**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA SEBAGAI UPAYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

**Oleh:**

**1Ris Artalina, S.Sos, M.Si; 2Khoirul Kholik Nasution, S.Sos, M.Si;**

**3 Indra Syahputra Marpaung, S.Sos, M.Si; 4 Wawan Patriansyah, S.Sos, M.Si**

*1Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan, 2Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan,*

*3Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan, 4Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan*

***Abstrak***

***Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.***

***Undang-Undang Pelayanan Publik atau*** [***Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik***](https://www.dropbox.com/s/rruryiki1st343j/UU_No_25_th_2009-pemerintah.net.pdf?dl=1) ***merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.***

***Program kerja adalah sebuah perwujudan dari komitmen dalam sebuah organisasi untuk mwujudkan visi dan misi bersama. Program merupakan rencana kegiatan yang akan dikerjakan terperinci. Program merupakan strategi & langkah - langkah untuk mencapai tujuan.***

***Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi cukup baik yaitu melalui Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta penyusunan Program Kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengimplementasikannya pada Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara***

***Kata kunci : Program, Kegiatan dan Pelayanan Masyarakat.***

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian.**

Semua Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik terutama Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dengan adanya undang-undang setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai kemampuan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan yang ada, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan harapan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama dari pemerintah atas pelayanan terhadap publik.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat ”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Masalah adalah salah satu proses penelitan yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan (Observasi, Survey, dan sebagainya).

Adapun yang merupakan perumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat ?

* 1. **Tujuan Penelitian.**

Adapun yang menjaditujuan dan sasaran penelitian ini adalah Untuk Menganalisa Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

1. Menjadi masukan berbagai pihak khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.
   1. **Kerangka Pemikiran**

Dari Uraian diatas penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Dinas Ketenaga kerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Padang Lawas Utara

Program

Dan

Kegiatan

Pelayanan kepada Masyarakat

**1.6. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat ini disertai dengan penganalisaan pada objek tertentu.

Kemudian metode lain yang dipergunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainyayang relevan dengan penelitian( Koentjaraningrat, 1983 )

1. Studi Lapangan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian lapangan (field research) yang termasuk jenis penelitian kuantitatif ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni angket.

**1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini Bulan Maret – Mei 2020.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Program Kerja.**

Pengertian program kerja atau agenda kegiatan dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh Pemerintah Daerah. Program kerja harus dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah, karena program kerja dalam pemerintahan untuk mencapai Visi ,Misi , tujuan dan sasaran dari Pemerintah Daerah.

* 1. **Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

**2.3 Pelayanan Masyarakat**

Pelayanan masyarakat atau pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

* 1. **Hipotesa**

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Hipotesis biasa digunakan dalam sebuah penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Berikut ini gambaran umum Kabupaten Padang Lawas Utara yang dilihat dari keempat aspek tersebut.

Aspek Geografi dan Demografi yaitu Karakteristik lokasi dan wilayah Luas dan batas wilayah administrasi Secara geografis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara memiliki luas 391.805 Ha yang terdiri dari 8 kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan pada tahun 2008, 386 desa dan 2 kelurahan. Pada tahun 2017, Kabupaten Padang Lawas Utara dimekarkan menjadi 12 wilayah kecamatan. pada dasarnya selain sangat potensial sebagai daerah pertanian, peternakan dan perkebunan juga sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai daerah transit dan jasa perdagangan khususnya hasil pertanian dan perkebunan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera. Potensi ini sangat penting sehingga perlu dibuat terobasan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

**3.2 Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara**

Berdasarkan peraturan bupati Padang Lawas Utara nomor 34 tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tatakerja dan uraian tugas pokok dan fungsi satuan perangkat daerah, susunan organisasi dinas ketenaga kerjaan dan koperasi UKM Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub bagian Program

c.Sub bagian Keuangan.

3.Bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, membawahi :

a. Seksi Pelatihan Kerja

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas

4. Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, membawahi:

1. Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Seksi Transmigrasi.
4. Bidang kelembagaan dan pengawasan, membawahi :
   1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan.
   2. Seksi Keanggotaan dan Penempatan Peraturan.
   3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
5. Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, membawahi :
   1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
   2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro
   3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**3.3 Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara**

Tugas pokok dan Fungsi Dinas ketenaga kerjaan dan koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana di atur dalam peraturan Bupati padang lawas utara nomor 34 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, koperasi, dan UKM, serta Transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   1. Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan UKM , serta Transmigrasi;
   2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan UKM , serta Transmigrasi;
   3. Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan UKM , serta Transmigrasi;
   4. Pemberian rekomendasi perijinan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan UKM , serta Transmigrasi;
   5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas :

* Mengkoordinasikan penyusunan program dengan memberikan arahan kepada sekretaris dan kepala bidang yang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD kebijaka Bupati, dan Kondisi objektif serta ketentuan yang berlaku;
* Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang ketenagakerjaan , koperasi dan UKM, serta Transmigrasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi objrktif di lapangan sebagai pediman dalam melaksanakan tugas;
* Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
* Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan member petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuaia dengan ketentuan yang berlaku;

b. Sekretaris :

* Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
* Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
* Mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan dan naskah dinass di bidang tugasnya;
* Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan sub bagian dalam melaksanakan tugasnya;
* Koordinasi pelayanan dan penandatanganan perjanjian kerja;
* Koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
* Koordinasipelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
* Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
* Pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota.

d.Bidang Hubungan Industrial dan Penyelesaian perselisihan Industrial :

* Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
* Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
* Koordasi pengesahan dokumen peraturan perusahaan daerah kabupaten/kota;
  1. Bidang kelembagaan dan pengawasan :
* Memverifikasi dan jumlah koperasi yang akurat;
* Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang akurat;
* Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembentuk, dan kantor kas;
* Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
* Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan/pinjam/unit simpan pinjam;
* Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten;
* Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
* Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
  1. Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro:
* Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
* Mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
* Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

**BAB IV KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara, diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

* + 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Upaya Pelayanan kepada masyarakat dinyatakan dalam kategori cukup baik.
    2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Upaya Pelayanan kepada masyarakat terdiri dari Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penyusunan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara.
    3. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan Program dan Kegiatan berdasarkan RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara, RENJA Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara dan RKA Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Daftar Pustaka**

Agung*,* KurniawanTransformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial, Gaya Media Jogyakarta, 2007.

Brownedan Wildavsky,(dalam Nurdin dan Usman), 2004

Gie, The Liang, Ensiklopedia Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1997.

Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media, Yogyakarta, 2011.

Jones, Charles, Pengantar Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1994.

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.

Lupiyoadi, Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktek. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001

LANRI, Membangun Kepemerintahan Yang Baik, Modul Diklatpim III, 1998

Moenir, Manajemen Pelayanan Publik, Bina Aksara, Jakarta, 2000

Ndraha, Taliziduhu, Ilmu Pemerintahan (Kybernology), Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Rasyid, Ryaas, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarif Watampone, Jakarta, 1998.

Ratminto, Manajemen P elayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Teori dan Praktek). Edisi. Pertama. Penerbit Salemba Empat,Depok, 2001

Sinambela, L.PReformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010

**PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.

[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik](https://www.dropbox.com/s/rruryiki1st343j/UU_No_25_th_2009-pemerintah.net.pdf?dl=1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas

Peraturan Pemerintah 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan

Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan public

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah